

**Analisis Peranan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
(SATPOL-PP) Dalam Pengamanan Lingkungan Kantor Gubernur
Provinsi Lampung**

Besari¹, Irsan Salim², Aulia Rahmawati³, Masayu Nilajuwita⁴, Hepiana Patmarina⁵

^{1,2,3,4,5}**Pascasarjana Universitas Bandar Lampung**

**Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kedaton, 35142, Bandar
Lampung, Indonesia.**

Email:

masayu@ubl.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of the Pamong Praja Police Unit in environmental security at the Lampung Governor's Office. The research method used is descriptive-qualitative research. The use of this method is to describe the role of the Pamong Praja Police Unit in securing the environment at the Governor's Office of Lampung Province. All data were obtained directly from informants in the field using interviews and document studies. The results showed that the role of the Pamong Praja Police Unit in securing the environment at the Lampung Provincial Governor's Office has been running well. The leadership of the Pamong Praja Police Unit has implemented existing regulations by giving tasks to employees according to their backgrounds and abilities. Although the implementation has not been optimal, this is due to the relatively lack of human resource capabilities. Then the inhibiting aspects are, the inhibiting aspects are, (1) The implementation of tasks has not been fully implemented properly, in accordance with the main tasks and functions, because they are often transferred to other places. (2) In carrying out tasks, sometimes members feel that the tasks they carry out are not in accordance with their section, so that the discipline of members is not appropriate in carrying out the tasks assigned by the leadership. (3) Members often have busy tasks, so there are often overlapping tasks and authorities carried out by members. (4) Realistic Lack of Incentive Money for Members of the Pamong Praja Police Unit in Environmental Security at the Lampung Province Governor's Office.

Keyword: Role, Main Task and Functions.

Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah para profesional yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Anggota ASN berperan penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi tugas-tugas umum pemerintahan, sehingga mendorong pembangunan nasional melalui penerapan kebijakan dan pelayanan publik yang professional (Bleskadit et al., 2020). Tanggung jawab pegawai mengharuskan pegawai untuk bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh politik serta menjauhkan diri dari praktik-praktik yang koruptif seperti korupsi, kolusi, dan

nepotisme. Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai negeri sipil diamanatkan untuk menjalankan dua fungsi mendasar: (1) Pelaksanaan kebijakan publik; (2) Penyediaan layanan publik.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang biasa disebut Satpol-PP, adalah lembaga pemerintah daerah yang ditugaskan dengan tanggung jawab menjaga ketentraman, menjaga ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah (Suhendi, 2019). Organisasi dan protokol operasional Satpol-PP diatur oleh Peraturan Daerah. Sebagai sebuah lembaga yang berada di bawah wewenang Provinsi Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) harus mematuhi peraturan daerah. Dengan perannya yang sangat penting dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, Satpol-PP secara signifikan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah yang efektif dan penegakan peraturan daerah. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai motivator di garis depan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah di dalam masyarakat, dan membantu memerangi berbagai bentuk malpraktek sambil menegakkan hukum (Lasahido, 2021).

Menegakkan peraturan daerah bukanlah hal yang mudah, terutama mengingat kewenangan represif non-yudisial yang terbatas dari Satpol PP. Petugas sering menghadapi banyak sekali tantangan, terutama ketika berhadapan dengan individu-individu yang didorong oleh kepentingan pribadi, yang mengarah pada potensi konflik (Bima et al., 2021). Terlepas dari upaya perekrutan, kendala sumber daya manusia masih tetap ada di Satuan Polisi Pamong Praja, yang diperparah dengan tidak adanya standar pelayanan minimum yang menghambat efektivitas operasional (Runtunuwu, 2022). Kerangka kerja kelembagaan yang ada saat ini kurang bersinergi, sehingga para petugas berada di garis depan dalam penyelesaian masalah di tingkat hilir tanpa keterlibatan awal dalam prosesnya. Untuk meningkatkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja, lembaga-lembaga harus dibentuk untuk mendorong kondisi daerah yang damai dan tertib, dengan mempertimbangkan tidak hanya kepadatan penduduk tetapi juga nuansa budaya dan risiko keamanan (Suhaiabah, 2020). Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia dalam Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat penting, karena kualitas personil sangat mempengaruhi kinerja organisasi (Pandiangan, 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka akan dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai Analisis Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Dalam Pengamanan Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung.

Tinjauan Pustaka

Peranan

Peranan dapat didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang berasal dari posisi tertentu, yang dipengaruhi oleh kepribadian seseorang (Anugrah et al., 2022). Terlepas dari apakah peranan tersebut dijalankan oleh pemimpin tingkat atas, menengah, atau bawah, peran tersebut tetap konsisten. Oleh karena itu, peranan dibentuk oleh pola sosial seseorang, yang menentukan interaksinya dengan orang lain (Rofiyanti et al., 2021). Memilih peranan dengan baik merupakan hal yang krusial, karena hal ini mengakui bahwa setiap individu bertindak sebagai aktor di dalam lingkungan sosialnya, mengemban berbagai peran yang mirip dengan aktor profesional (Widiyanto et al., 2022). Dalam konteks birokrasi, peranan merupakan atribut yang berasal dari status, yang menggambarkan ekspektasi masyarakat terhadap pemegang

status. Pada dasarnya, peranan hanya merupakan salah satu sisi dari status, yang membentuk hubungan sosial di dalam masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, individu mengasumsikan posisi sosial dan memenuhi peranan yang sesuai (Akbar et al., 2023).

Peranan adalah dimensi yang berkembang dari posisi (status). Ketika seseorang memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisinya, pada dasarnya ia menjalankan sebuah peran. Kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan dan pada dasarnya saling melengkapi. Setiap orang mengasumsikan berbagai peranan yang berasal dari pola sosialnya, sehingga membentuk kontribusinya terhadap masyarakat (Ernawati, 2021). Peranan menggarisbawahi fungsionalitas, adaptasi, dan pada dasarnya bersifat dinamis. Definisi peranan terkait erat dengan posisi (status); meskipun keduanya memiliki tujuan ilmiah yang berbeda, pada dasarnya keduanya saling berhubungan. Memang, tidak ada peran tanpa posisi, atau posisi tanpa peran (Firdaus & Fadhilah, 2020).

Oleh karena itu, penerapan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung sejalan dengan penggambaran peran yang dilakukan oleh (Bestari, 2019) antara lain:

- 1) Menjalankan peran sebagai entrepreneur, yang melibatkan pemahaman terhadap isu-isu organisasi dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki.
- 2) Menjalankan peran sebagai penghalau gangguan, di mana atasan memikul tanggung jawab untuk organisasi selama masa-masa bahaya.
- 3) Menjalankan peran sebagai pengalokasi sumber daya, di mana atasan memutuskan alokasi dana dan informasi di seluruh organisasi.
- 4) Berperan sebagai negosiator, yang mengharuskan atasan untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses negosiasi.

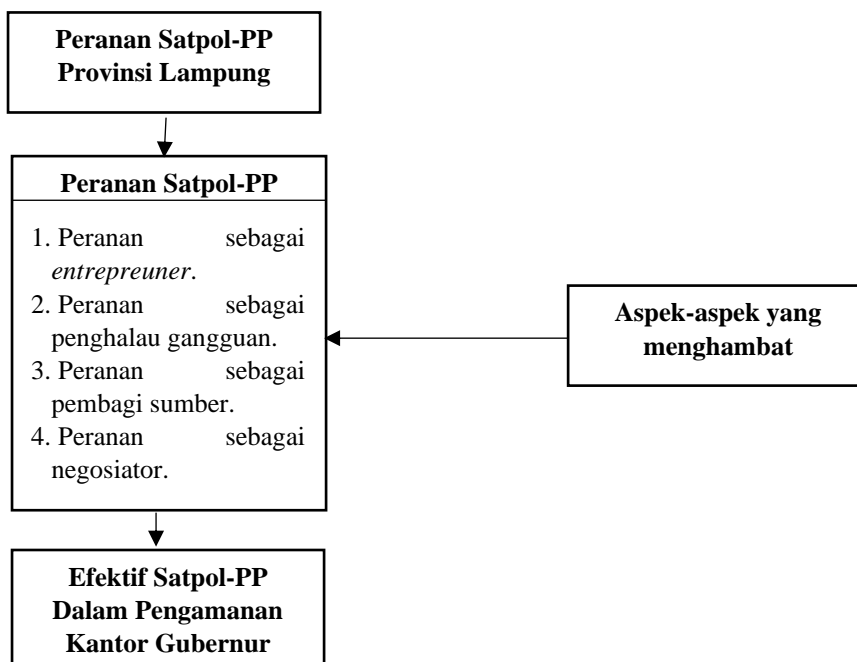
Tugas Pokok dan Fungsi

Secara umum, tanggung jawab utama dalam sebuah organisasi atau institusi melibatkan pemenuhan tugas dan fungsi penting secara teratur. Tugas-tugas ini memanfaatkan kompetensi anggota atau karyawan untuk mencapai program kerja yang telah ditentukan yang selaras dengan tujuan, visi, dan misi organisasi (Destiningsih & Lestari, 2020). Setiap pegawai diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu secara rinci, terkategori dengan jelas dalam setiap departemen atau unit, yang disesuaikan dengan tuntutan praktis dan konkret dari masyarakat sesuai dengan kemampuannya (Edwandar & Zaili Rusli, 2017). Tugas pokok dalam sebuah organisasi adalah pekerjaan atau aktivitas penting dan berulang yang dilakukan oleh seorang karyawan, yang memberikan perspektif tentang signifikansi, ruang lingkup, atau kompleksitas peran tersebut dalam mencapai tujuan tertentu (Priyono, 2023). Berdasarkan definisi tugas pokok dan fungsi, konsep tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) mencakup sekumpulan aktivitas yang berbeda dan saling berhubungan yang dilakukan oleh karyawan, yang masing-masing disesuaikan untuk mencapai tujuan organisasi yang spesifik melalui sifat dan pelaksanaannya yang melekat.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diberikan pada suatu jabatan secara signifikan berdampak pada efisiensi karyawan dalam organisasi. Kinerja yang efektif bergantung pada pelaksanaan tugas-tugas ini secara tepat dan konsisten, yang secara langsung digambarkan oleh

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) berikut analisis yang menyeluruh (Permani, 2021). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas karyawan dalam mencapai tujuan organisasi, sangat penting untuk merumuskan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang jelas dan terperinci melalui proses analisis jabatan awal yang melibatkan pengumpulan data yang relevan dengan setiap posisi dalam organisasi.

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, dengan fokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengamankan lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung. Pendekatan deskriptif kualitatif melibatkan analisis rinci dari data yang dikumpulkan langsung dari informan lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Penelitian kualitatif dipilih karena memberikan wawasan tentang kehidupan manusia, sejarah, perilaku, dinamika organisasi, gerakan sosial, dan hubungan kekerabatan yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya. Dilakukan oleh peneliti dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan yang relevan dengan penelitian ini, sedangkan data sekunder bersumber dari tinjauan dokumen, buku, dan artikel.

Analisis data meliputi teknik-teknik seperti reduksi data untuk menyederhanakan dan memfokuskan pada elemen-elemen kunci, penyajian data untuk mengorganisasikan temuan secara efektif, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk menetapkan signifikansi temuan. Teknik untuk memastikan keabsahan data melibatkan pengamatan yang tekun, triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber data, dan diskusi di antara para peneliti untuk menyempurnakan interpretasi dan memastikan kekokohan kesimpulan yang diambil.

Hasil dan Pembahasan

Peranan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung.

Secara umum setiap pegawai dituntut untuk memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), yaitu tugas-tugas pokok atau kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota organisasi atau instansi secara teratur, dengan menggunakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki untuk memenuhi program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi organisasi. Demikian pula halnya dengan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Lampung yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang terdiri dari serangkaian tugas dan kewajiban utama yang saling berkaitan.

Peraturan perundang-undangan seringkali menegaskan bahwa organisasi menjalankan fungsi-fungsi untuk memenuhi tugas utama dalam kerangka kerjanya. Setiap pegawai diharapkan untuk melaksanakan kegiatan yang terperinci dengan jelas di dalam bagian atau unit masing-masing. Tugas-tugas spesifik ini diorganisasikan ke dalam unit-unit yang praktis dan nyata, yang dirancang untuk memenuhi kemampuan dan tuntutan masyarakat yang semakin cerdas saat ini.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Lampung memainkan peran penting dalam memastikan keamanan lingkungan di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Satpol-PP Provinsi Lampung. Wawasan ini secara langsung diperoleh dari informan lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Adapun kriteria untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut melalui pendekatan ini meliputi (1) Peran kewirausahaan, (2) Peran penanggulangan gangguan, (3) Peran alokasi sumber daya, dan (4) Peran negosiasi, yang dibuktikan dengan temuan di lapangan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peranan sebagai entrepreneur

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Lampung, dalam peran sebagai entrepreneur, diharapkan untuk menunjukkan sikap positif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa individu dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Lampung cenderung menunjukkan sikap tertutup terhadap rangsangan atau objek. Sikap, yang didefinisikan sebagai respon emosional terhadap suatu situasi yang mencerminkan kondisi mental atau perilaku seseorang, berfungsi untuk memotivasi individu untuk memahami dan melaksanakan tugas mereka secara efektif, menumbuhkan semangat untuk mencapai tujuan organisasi.

Terkait dengan peran personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam pengamanan lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung, hal ini berkaitan dengan pemahaman terhadap program, kewenangan, prospek pembangunan, dan komitmen dari pihak yang melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, ada tiga sikap potensial yang mungkin muncul di antara para pegawai: pertama, melaksanakan program kebijakan; kedua, menentang program kebijakan, baik secara terbuka maupun secara diam-diam; dan ketiga, mengambil sikap netral, yang menyiratkan keterlibatan dalam program tersebut jika menguntungkan. Perilaku para pelaksana dipengaruhi oleh integritas, loyalitas, dan kompetensi yang mereka tunjukkan terhadap organisasi dan kebijakan yang mereka jalankan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, mengemukakan bahwa “setiap pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah berusaha untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dalam Pengamanan Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung, yang diberikan oleh pimpinan sebaik mungkin, tentunya berdasarkan ketentuan yang ada pada pelaksanaan yang ada dan telah berjalan sesuai ketentuan, namun karena keterbatasan sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah keterbatasan jumlah pegawai sehingga pegawai belum sepenuhnya dapat melaksanakan tugas dengan optimal.”

Dengan demikian, pentingnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam menjaga lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung, yang berfungsi sebagai entrepreneur dengan membina konsensus di antara para anggotanya untuk memberlakukan kebijakan, muncul sebagai penentu yang sangat penting bagi efektivitas Satpol-PP. Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, diperlukan lebih dari sekedar kesadaran akan tugas; hal ini menuntut kemampuan dan kemauan di antara para anggota untuk melaksanakan kebijakan dengan tekun dan menggunakan wewenang mereka secara bijaksana sesuai dengan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, pelaksanaan peran yang optimal terkadang terhambat oleh kekurangan dalam implementasi kebijakan.

2. Peranan sebagai penghalau gangguan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tetap teguh dalam upayanya menegakkan peraturan daerah, memastikan keamanan melalui operasi yang dilakukan secara konsisten sepanjang hari. Upaya ini secara khusus berfokus pada pengamanan lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung, yang bertujuan untuk mempertahankan suasana kondusif yang dicita-citakan oleh kebijakan transit di Provinsi Lampung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, terungkap bahwa Satpol PP Provinsi Lampung secara konsisten menekankan pentingnya kerja keras di antara para anggotanya. Arahannya menggaris bawahi pentingnya anggota Satpol PP untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi yang teguh dalam memenuhi tanggung jawab utama mereka. Dedikasi ini sangat penting dalam memastikan keamanan, stabilitas, dan ketertiban umum di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Untuk mencegah terjadinya gangguan, khususnya dalam menjaga lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung, peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung adalah sebagai penegak ketertiban dengan tetap mengedepankan kesantunan dalam bertindak. Pendekatan ini sangat penting untuk menghindari timbulnya ketidakpuasan atau persepsi perlakuan yang tidak adil di kalangan masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, sangat penting bagi unit ini untuk menunjukkan fungsi ganda yaitu perlindungan dan edukasi kepada masyarakat.

3. Peranan sebagai pembagi sumber

Sumber daya manusia sangat penting dalam proses implementasi kebijakan, yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan, serta fungsi pengawasan. Menyadari pentingnya hal tersebut, maka sangat penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kemampuan khusus dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Upaya ini, terutama difokuskan pada pelatihan teknis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit, telah dilakukan secara konsisten. Selain itu, kesempatan pendidikan formal, termasuk untuk meraih gelar Sarjana dan Magister, juga diberikan kepada pegawai yang berminat. Selain itu, pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga diakomodasi, asalkan tidak mengganggu jam kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan dan pelatihan pegawai didefinisikan sebagai proses belajar mengajar terstruktur yang dirancang dengan cermat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan profesionalisme peserta. Upaya bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja di antara para pegawai.

4. Peranan sebagai negosiator

Setiap pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung berperan sebagai negosiator dalam memfasilitasi komunikasi. Secara konseptual, komunikasi memerlukan transmisi pesan dari satu individu ke individu lainnya. Dengan demikian, keterlibatan manusia merupakan hal yang mendasar untuk memahami dan melaksanakan esensi komunikasi secara efektif.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, dikemukakan bahwa pimpinan secara konsisten memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas. Para pegawai mematuhi secara ketat Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan, untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh di antara semua pegawai. Oleh karena itu, pegawai di lapangan selalu siap untuk memenuhi arahan dari pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, komunikasi melibatkan penyampaian pesan dari komunikator. Penyebaran pesan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Lampung, kabupaten atau kota berupa Peraturan Gubernur yang menjabarkan tugas, fungsi, dan prosedur operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam mengamankan dan menjaga ketertiban di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung. Komunikasi ini dilakukan melalui sarana tertulis, seperti petunjuk teknis, dan jalur lisan, termasuk sesi pengarahan dan dialog. Tidak adanya tugas-tugas yang sangat teknis dalam tanggung jawab pegawai sehari-hari membuat proses komunikasi ini relatif mudah.

Aspek-aspek yang menghambat peranan peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Lampung.

Adapun aspek-aspek penghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Pengamanan Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung, yaitu:

1. Pelaksanaan peran Satpol-PP Provinsi Lampung yang optimal dalam menjaga lingkungan kantor terhambat oleh seringnya terjadi mutasi, sehingga anggota tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
2. Anggota Satpol-PP Provinsi Lampung sering merasakan ketidaksesuaian antara tugas yang diberikan dengan tugas kedinasannya, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas sesuai arahan pimpinan.
3. Kesejahteraan anggota Satpol-PP Provinsi Lampung yang relatif masih rendah di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung menyebabkan kurangnya ketaatan terhadap standar kerja yang diharapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, yang ditugaskan untuk Keamanan Lingkungan di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, telah mengikuti arahan pimpinan, dievaluasi di seluruh dimensi seperti (1) Peran entrepreneur, (2) Peran pencegahan gangguan, (3) Peran pembagian sumber daya, dan (4) Peran negosiator. Meskipun peraturan telah dipatuhi dan tugas-tugas diberikan berdasarkan latar belakang dan kemampuan anggota, pelaksanaannya masih jauh dari kinerja yang optimal.
2. Hambatan-hambatan yang teridentifikasi meliputi: (1) Tidak memadainya pemenuhan tugas oleh anggota Satpol-PP karena seringnya terjadi mutasi yang menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya. (2) Ketidaksihinggaan antara tugas yang diberikan dan tugas resmi yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap disiplin di antara para anggota. (3) Tingkat kesejahteraan anggota Satpol-PP yang relatif rendah di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung.

Daftar Pustaka

- Akbar, F. Y., Hasanuddin, H., & Yuridka, F. (2023). Human Resource And Archive Management Application For The Regional Civil Service Police And Fire Department In Tapin. *International Journal On Advanced Technology, Engineering, And Information System*, 2(4), 256–272.
- Anugrah, F., Bachri, S., & Sumardi, J. (2022). The authority of the civil service police unit in securing regional assets of the South Sulawesi provincial government. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 121–141.
- Bestari, P. (2019). *Peranan Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Karyawan*.
- Bima, B., Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2021). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 134–142.
- Bleskadit, H. M., Kaawoan, J., & Kumayas, N. (2020). Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Provinsi Papua Barat (Studi Pembuatan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong). *Jurnal Eksekutif*, 1(4).
- Destiningsih, R., & Lestari, E. (2020). Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 78–87.
- Edwandar, B., & Zaili Rusli, H. (2017). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)* (Vol. 4).

- Ernawati, H. (2021). Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kota Samarinda. *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 1666–1785.
- Firdaus, R. A., & Fadhilah, H. A. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tatapamong*, 53–68.
- Lasahido, A. A. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 829–843.
- Pandiangan, A. (2018). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*.
- Permani, D. R. (2021). Pengaruh Komunikasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda. *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 1648–1665.
- Priyono, H. S. (2023). Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 7(2), 165–177.
- Rofiyanti, E., Arofah, E., Agustina, D., & Sukandi. (2021). Analysis Of The Effectiveness Of Work Planning In Improving The Performance Of Civil Servise Police Unit/ Satpol PP. *Ilomata International Journal of Social Science*, 2(3), 181–189.
- Runtunuwu, J. (2022). Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 10(5).
- Suhaibah, A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Keamanan Dan Penegakan Hukum. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(1), 43–61.
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 35–47.
- Widiyanto, R., Rismayadi, B., & Sumarni, N. (2022). The Effect of Work Environment and Work Discipline On Performance Of Pamong Praja Police Unit (Satpol Pp) Karawang Performance. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 10(2), 104–111.